

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG
DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 4/PID-SUS-TPK/2022/PN TPG)**

**Oleh
Dian Putri Patrecia Lubis
NIM. 2105040111**

Abstrak

Penelitian ini membahas tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kasus Putusan Nomor 4/Pid-Sus-TPK/2022/PN.TPG. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengungkap bagaimana penerapan hukum terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang oleh ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa, selaku ASN, terbukti menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan manipulasi data penerima insentif COVID-19 sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 513.603.958. Tindakan tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman pidana dan denda sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Kesimpulannya, penyalahgunaan wewenang oleh ASN merupakan tindakan pidana serius yang berdampak negatif terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Penegakan hukum harus ditegakkan secara konsisten untuk mencegah praktik serupa di masa depan. Disarankan adanya peningkatan pengawasan, edukasi terhadap ASN, dan transparansi dalam pengelolaan dana publik agar penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir.

Kata Kunci: penyalahgunaan wewenang, Korupsi, Aparatur Sipil Negara.

**ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF ABUSE OF AUTHORITY
COMMITTED BY CIVIL STATE APPARATUS
(CASE STUDY OF DECISION NUMBER 4/PID.SUS-TPK/2022/PN.TPG)**

**By
Dian Putri Patrecia Lubis
NIM. 2105040111**

Abstract

This study examines the criminal act of abuse of authority committed by State Civil Apparatus (ASN) in the case of Decision Number 4/Pid-Sus-TPK/2022/PN.TPG. The purpose of this study is to identify and analyze the criminal act of abuse of authority by ASN and its legal implications based on court decisions. The research method used was qualitative with a normative juridical approach. Data were obtained through document studies in the form of court decisions and related laws and regulations. Descriptive analysis was conducted to uncover how the law applies to abuse of authority by civil servants. The results showed that the defendant, as a civil servant, was proven to have abused his authority by manipulating data on COVID-19 incentive recipients, resulting in state losses of Rp 513,603,958. This action fulfills the elements of abuse of authority as stipulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. In the verdict, the defendant was sentenced to criminal penalties and fines as a form of legal accountability. In conclusion, abuse of authority by ASN is a serious criminal act that negatively impacts state finances and public trust. Law enforcement must be consistently enforced to prevent similar practices in the future. It is recommended that there be increased supervision, education for ASN, and transparency in the management of public funds to minimize abuse of authority.

Keywords: abuse of authority, corruption, civil servants.